PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN KELUARGA MISKIN DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

(Skripsi)

Oleh

SEPTIANI DEWI ZAHRA NPM 2013034054



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIIDKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

ABSTRAK

PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN KELUARGA MISKIN DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

SEPTIANI DEWI ZAHRA

Kemiskinan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, begitupun sebaliknya, rendahnya pendidikan dapat memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah merancang berbagai strategi untuk mengatasi kemiskinan dan masalah pendidikan secara bersamaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan salah satu fokus utamanya yaitu untuk peningkatan partisipasi masyarakat miskin terhadap pendidikan supaya dapat memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap Partisipasi Pendidikan Keluarga Miskin di Desa Tanjung Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan analisis statistik menggunakan bantuan SPSS 24 dan dijabarkan dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 86 orang yang merupakan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Hasil dari uji regresi linier sederhana pada penelitian ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan koefisien determinasi (R square) sebesar 0,302 itu artinya terdapat pengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin di desa tanjung jaya sebesar 30,2%.

Kata Kunci: PKH, partisipasi pendidikan, dan keluarga miskin.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) ON THE EDUCATIONAL PARTICIPATION OF POOR FAMILIES IN TANJUNG JAYA VILLAGE, PALAS SUB-DISTRICT, SOUTH LAMPUNG DISTRICT

By

SEPTIANI DEWI ZAHRA

Poverty can affect the quality of education, and conversely, low education can exacerbate poverty. Therefore, the government has designed various strategies to overcome poverty and education problems simultaneously, one of the efforts made by the government was to create a Family Hope Program called PKH with one of its main focuses being to increase the participation of the poor in education in order to break the chain of poverty through education. This study aims to determine whether the Family Hope Program (PKH) affects the Educational Participation of Poor Families in Tanjung Jaya Village. The method used in the research is quantitative method with statistical analysis using the help of SPSS 24 and described with a descriptive approach. The sample in this study amounted to 86 people who were housewives from poor families registered in the Family Hope Program (PKH) in the education component. Data collection techniques in this study used observation, questionnaires, and documentation, while the data analysis technique used in this study was simple linear regression. The results of the simple linear regression test in this study show that the significance level is 0.000 < 0.05 and the coefficient of determination (R square) is 0.302, which means that there is an influence on the Family Hope Program (PKH) on the educational participation of poor families in tanjung jaya village by 30.2%.

Keywords: PKH, education participation, and poor family.

PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN KELUARGA MISKIN DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

SEPTIANI DEWI ZAHRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024 Judul Skripsi

PENGARUH PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) TERHADAP
PARTISIPASI PENDIDIKAN KELUARGA
MISKIN DI DESA TANJUNG JAYA
KECAMATAN PALAS KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Nama Mahasiswa

Nomor Pokok Mahasiswa

2013034054

Program Studi

Pendidikan Geografi

Septiani Dewi Zura

Jurusan

Pendidikan IPS

Fakultas

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Pargito, M.Pd.

NIP 9590414 198603/1 005

Dr. M. Thoha B.S. Jaya, M.S.

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Ketua Program Studi Pendidikan Geografi

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.NIP 19750517 200501 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Dr. Pargito, M.Pd.

Sekretaris UNIVERS; Dr. M. Thoha B.S. Jaya, M.S

Penguji Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunyono, M.Si. NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Septiani Dewi Zahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2013034054

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan/Fakultas : PIPS/KIP

Alamat : Jalan Sudirman, RT/RW 004/001, Desa Tanjung

Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35594

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Keluarga Miskin di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2024

Pernyataan,

Septiani Dewi Zahra NPM, 2013034054

RIWAYAT HIDUP



Septiani Dewi Zahra dilahirkan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni dari pasangan Bapak Tata Sutarman dan Ibu Siti Rodiah.

Penulis menempuh dan menyelesaikan pendidikan yakni Taman Kanak-kanak (TK) di TK Harapan Ibu Bandung Barat pada tahun 2007, Pendidikan Dasar di SDN 4 Bumidaya pada Tahun 2008-2014. Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Palas pada tahun 2014-2017, Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Palas pada tahun 2017-2020. Pada Tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa yaitu English Society Unila sebagai staff dari departemen Homebase pada tahun 2022. Pada tahun 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan melaksanakan kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Islam Sabilul Hidayah, Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

MOTO

"Maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik."

(Q.S. Al-Ma'arij: 5)

"Hidup bukan saling mendahului,
Bermimpilah sendiri-sendiri"

(Hindia)

"Even if the scenery hidden in the clouds isn't what i expected,

I'll believe in the faint hope left in my heart"

(Enhypen)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan karya tulis sederhana ini sebagai tanda bakti dan cinta kasih kepada:

Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku sayangi, Bapak Tata Sutarman dan Ibu Siti Rodiah yang telah merawatku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, serta selalu memberikan yang terbaik. Terimakasih atas doa yang selalu tercurah, pengorbanan yang tiada tara dan dukungan sepanjang waktu demi keberhasilanku,

Adik-adikku, Aditya Rizki Firdaus, Chelsilia Dewi Maulida, dan Afrina Azmi Lestari yang selalu memotivasiku agar selalu menjadi contoh yang baik.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, keluarga besar serta sahabat tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Program Keluarga Harapan atau PKH terhadap Partisipasi Pendidikan Keluarga Miskin di Desa Tanjung Jaya". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Pargito, M.Pd. selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. M. Thoha B.S. Jaya, M.S. selaku dosen pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, dan Bapak Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku dosen pembahas yang telah sabar memberikan bimbingan, nasihat, dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- 2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

- 4. Ibu Hermi Yanzi S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- 7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Pendidikan Geografi, yang telah mendidik dan membantu penulis selama menjalankan studi;
- 8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tata Sutarman dan Ibu Siti Rodiah atas kesabaran yang telah diberikan kepadaku, terimakasih telah mengajarkanku kesederhanaan dalam menjalani kehidupan, terimakasih karena selalu memberikan motivasi, nasehat dan dukungan atas segala keputusan yang pernah aku ambil dalam hidupku;
- Adik-adikku Aditya Rizki Firdaus, Chelsilia Dewi Maulida, dan Afrina Azmi Lestari yang selalu membawa keceriaan dalam hidupku terimakasih telah menjadi salah satu motivasi terbesarku untuk segera menyelesaikan studi;
- 10. Sahabatku tercinta, Nanda Yuniar yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku baik suka maupun duka dan selalu memberi dukungan baik berupa moral maupun materi. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini;
- 11. Sahabat-sahabatku di masa putih abu-abu, yaitu Aprilia Rizki, Linda Yuliani, Sahrul Hendrawan dan Rajib Wijaya yang selalu siap membantu penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 12. Maharani Mas'ulah dan Dian Putri selaku sahabat dan saudara di perantauan, Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan moral, tawa, dan semangat yang kalian berikan serta motivasi untuk menyelesaikan studi ini;
- 13. Sahabat-sahabat terbaiku, yaitu Delfiera Adithia, Anti Agustina, Mitha Oktaviana, Nanik Parwati, Tika Animah, dan Vivi Emilia yang telah membuat dunia perkuliahan menjadi lebih berwarna dan bermakna. Terimakasih atas

semua kebersamaan, dukungan, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi

ini;

14. Teman-teman istimewa, yaitu Anisa Megawangi Putri Aji, Fitriani, Dios

Yuceka, Mario, Chantrika Anindhia dan Ghina Alyaa Arzki yang telah banyak

membantu selama masa perkuliahan serta memberikan banyak masukan dalam

penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan bantuan yang telah

diberikan;

15. Keluarga KKN Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu,

Kabupaten Way Kanan, khususnya Muhammad Arif, Surya Al-Ma'arif, Indah

Sabilla, dan Kholifatul Kiftiyah yang telah memberikan banyak dukungan,

semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini;

16. Teman-teman Program Studi Pendidikan Geografi angkatan 2020 sekaligus

teman seperjuangan skripsi yang telah membantu, memberikan arahan, dan

berbagi pengalaman selama menuntut ilmu di Universitas;

17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 6 Agustus 2024

Septiani Dewi Zahra 2013034054

DAFTAR ISI

Η	al	ar	n	aı

DAI	TAI	R TABEL	iii
DAI	TAI	R GAMBAR	V
DAF	TAI	R LAMPIRAN	v i
I.	PE	NDAHULUAN	1
		Latar Belakang.	
		Identifikasi Masalah	
	1.3	Batasan Masalah	9
	1.4	Rumusan Masalah	9
	1.5	Tujuan Penelitian	9
	1.6	Manfaat Penelitian	10
	1.7	Ruang Lingkup Penelitian	10
II.		NJAUAN PUSTAKA	
	2.1	Kajian Teori	
		2.1.1 Geografi	
		2.1.2 Kemiskinan	
		2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)	
		2.1.4 Partisipasi Pendidikan	
		Penelitian Relevan	
		Kerangka Berpikir	
	2.4	Hipotesis	34
III.	ME	ETODE PENELITIAN	35
111.		Metode Penelitian	
		Lokasi dan Waktu Penelitian	
		Populasi dan Sampel Penelitian.	
		Variabel Penelitian	
		Definisi Operasional Variabel	
		3.5.1 Program Keluarga Harapan (X)	
		3.5.2 Partisipasi Pendidikan (Y)	
	3.6	Teknik Pengumpulan Data	
		3.6.1 Observasi	
		3.6.2 Kuesioner (Angket)	

	3.6.3 Dokumentasi	49
	3.7 Instrumen Penelitian	50
	3.7.1 Kuesioner Program Keluarga Harapan (PKH)	50
	3.7.2 Kuesioner Partisipasi Pendidikan	
	3.8 Uji Prasyarat Instrumen	51
	3.8.1 Uji Validitas	52
	3.8.2 Uji Reliabilitas	53
	3.9 Teknik Analisis Data	54
	3.9.1 Uji Prasyarat Analisis Data	54
	3.9.2 Uji Hipotesis	55
	3.10Teknik Pengukuran Data	
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	58
	4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
	4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Jaya	
	4.1.2 Kondisi Geografis Desa Tanjung Jaya	
	4.1.3 Kondisi Penduduk Desa Tanjung Jaya	
	4.2 Hasil Penelitian	
	4.2.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian	
	4.2.2 Uji Prasyarat Instrumen Penelitian	
	4.2.3 Uji Prasyarat Analisis Data	
	4.2.4 Uji Hipotesis	
	4.3 Pembahasan	
V.	KESMPULAN DAN SARAN	100
••	5.1 Kesimpulan	
	5.2 Saran	
DAI	FTAR PUSTAKA	102
LAN	MPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Jaya	7
2. Nominal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	27
3. Populasi Penelitian	37
4. Jumlah Penerima PKH Komponen Pendidikan/Dusun	37
5. Sampel Penelitian	40
6. Definisi Operasional Variabel	47
7. Kisi-kisi Intrumen Program Keluarga Harapan	50
8. Kisi-Kisi Intrumen Partisipasi Pendidikan	51
9. Kategori Skor Jawaban Kuesioner	51
10. Penggunaan Lahan di Desa Tanjung Jaya	59
11. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Jaya	60
12. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Jaya Berdasarkan Umur dan Jenis	
Kelamin	62
13. Mata Pencaharian di Desa Tanjung Jaya	65
14. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	65
15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	66
16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku	66
17. Jumlah Responden Penelitian	67
18. Umur Responden Penelitian	68
19. Jumlah Penghasilan Responden Penelitian	68
20. Pendidikan Terakhir Responden Penelitian	69
21. Data Kuesioner Pelaksanaan Program Keluarga Harapan/PKH (X)	70
22. Data Kuesioner Pelaksanaan Partisipasi Pendidikan (Y)	72
23. Kategori Data Penelitian	75

24. Kategori Pelaksanaan PKH (X) dan Partsiapasi Pendidikan (Y	<i>Y</i>) 75
25. Hasil Uji Validitas Variabel Program Keluarga Harapan/PKH	(X) 76
26. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Pendidikan (Y)	77
27. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Program Keluarga Harapan/PK	XH (X) 79
28. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Program Keluarga Harapan/PK	XH (X) Tiap
Item	79
29. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Pendidikan (Y)	80
30. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Pendidikan (Y)	81
31. Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i> pada Program Kel	uarga
Harapan/PKH (X) terhadap Partisipasi Pendidikan (Y)	82
32. Hasil Uji Lineritas pada Program Keluarga Harapan/PKH (X)	terhadap
Partisipasi Pendidikan (Y)	83
33. Hasil Uji Regresi Liner Sederhana	85
34. Hasil Perhitungan t dan Signifikansi	85
35. Hasil Perhitungan R Kuadrat	87
36. Hasil Uji Regresi Linier Perdusun di Desa Tanjung Jaya	87
37. Hasil Perhitungan T dan R kuadrat Pada Tiap Dusun	88
38. Tingkat Pengaruh X terhadap Y	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	34
2. Peta Lokasi Penelitian	36
3. Peta Persebaran Penerima PKH Komponen Pendidikan Desa Tanjung	g Jaya 38
4. Peta Titik Persebaran Sampel Penelitian	41
5. Piramida Penduduk Desa Tanjung Jaya	64
6. Peta Tingkat Pengaruh PKH (X) terhadap Partispasi Pendidikan (Y).	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Pra Penelitian	106
2. Surat Permohonan Penelitian	107
3. Surat Izin Penelitian di Desa Tanjung Jaya	108
4. Lembar Kuesioner Penelitian	109
5. Distribusi Nilai r tabel Product Moment Sig. 5% dan 1%	114
6. Distribusi Nilai t tabel	115
7. Tabulasi Data Uji Validitas Variabel X	116
8. Tabulasi Data Uji Validitas Variabel Y	117
9. Output Uji Validitas Instrumen Variabel X Pada SPSS Versi 24	118
10. Output Uji Validitas Instrumen Variabel Y Pada SPSS Versi 24	121
11. Output Hasil Uji Reliabilitas Variabel X Pada SPSS Versi 24	124
12. Output Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y Pada SPSS Versi 24	125
13. Hasil Perhitungan Kuesioner Variabel PKH (X)	126
14. Hasil Perhitungan Kuesioner Variabel Partsipasi Pendidikan (Y)	130
15. Pengkategorian Variabel X dan Variabel Y	134
16. Output Hasil Uji Normalitas Pada SPSS Versi 24	137
17. Output Hasil Uji Linearitas Pada SPSS Versi 24	138
18. Output Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Desa Tanjung Jaya	139
19. Output Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Tiap Dusun di Desa Ta	njung
Jaya	140
20. Dokumentasi Pra Penelitian	146
21 Dokumentasi Penelitian	147

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu negara melakukan berbagai perencanaan atau serangkaian usaha yang terencana pada segala aspek dan bidang kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk pengamalan pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, Indonesia melakukan perencanaan dan usaha tersebut melalui Pembangunan Nasional. Menurut Todaro Smith (2020) yaitu salah satu pelopor di bidang ekonomi dan pembangunan mengatakan bahwa pembangunan meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan tersebut dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan sosial dan ekonomi.

Seperti yang ditulis pada laman CNN Indonesia yang dikutip dari world population review, Indonesia masuk ke dalam 100 daftar negara miskin sebagai urutan ke tujuh puluh tiga dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Oleh karena itu kemiskinan di Indonesia menjadi masalah sosial yang senantiasa dikaji secara terus-menerus. Kemiskinan tersebut dapat berimbas kepada aspek lainnya, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, sehingga pembangunan nasional pada aspek sosial dan ekonomi menekankan pada pemberantasan kemiskinan dan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam tujuan pembangunan di Indonesia.

Kemiskinan dapat mencerminkan bagaimana kualitas hidup suatu negara yang diartikan sebagai ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan tersebut juga dipandang sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup yang minimal. Dengan tingginya tingkat kemiskinan yang ada, maka dapat terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat belum terealisasikan secara menyeluruh dan pembangunan nasional belum mencapai tujuan pembangunan yang sesungguhnya, sehingga dalam mengatasinya diperlukan upaya khusus dengan berbagai kebijakan dalam program pembangunan yang dapat memperkuat sistem perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Di tengah masalah kemiskinan terdapat fenomena lainnya, yang merupakan dampak dari kemiskinan salah satunya yaitu pada aspek pendidikan. Kemiskinan tidak dapat terlepas dari pendidikan, keduanya merupakan bagian dari sasaran Pembangunan Nasional. Berbagai masalah pendidikan terjadi akibat kemiskinan dimana rendahnya tingkat pendapatan dan kualitas hidup keluarga miskin berdampak juga pada rendahnya tingkat pendidikan anak. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 6 Ayat 1 yang dikutip sebagai berikut "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Namun pada kenyataannya, berdasarkan data BPS yang diambil dari survei SUSENAS (2019) masih terdapat kasus anak-anak putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, masih banyak kasus mengenai pekerja anak, dimana anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun telah putus sekolah dan menjadi pekerja. Alasan utama anak-anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan adalah karena tidak ada biaya dan harus membantu orang tua dalam mencari nafkah. Hal ini merupakan suatu bentuk eksploitasi anak guna membantu kondisi perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan anak-anak yang melakukan hal tersebut disebut sebagai pekerja anak.

Rendahnya penghasilan keluarga miskin menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan karena beranggapan dengan menyekolahkan anaknya maka sumber pendapatannya akan hilang untuk membiayai sekolah.

Banyaknya kasus anak putus sekolah dikarenakan tidak ada biaya sehingga mereka memutuskan untuk bekerja dalam membantu orang tua mencari nafkah. Pendidikan membebani biaya pada orang tua anak, sedangkan bekerja memberikan tambahan pendapatan bagi orang tua anak. Hal ini mendorong banyak orang tua miskin condong memilih mempekerjakan anaknya. Keluarga miskin lebih memprioritaskan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan pendidikan, sehingga anak dari keluarga miskin ikut serta menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase pekerja anak di tahun 2020 sebanyak 3,25 persen, lalu di tahun 2021 sebanyak 2,66 persen dan tahun 2022 sebanyak 2,44 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tentu hal tersebut terjadi karena berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah anak putus sekolah melalui berbagai kebijakan namun nampaknya berbagai strategi yang dilakukan pemerintah belum tercapai secara optimal dalam mengatasi rendahnya pendidikan akibat kemiskinan karena angka yang ditunjukkan masih jauh untuk mencapai angka nol.

Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya pembangunan manusia, yaitu sebuah proses kegiatan yang dilakukan suatu wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu tolak ukur pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia yang diukur melalui kesehatan kualitas tingkat pendidikan dan ekonomi (Nugraheni, 2020). Maka dari itu, pendidikan dapat menjadi sarana dalam meningkatkan potensi diri manusia yang nantinya menjadi modal pembangunan. Pembangunan dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada suatau pendidikan tanpa pembangunan dan tidak akan berjalan suatu pembangunan tanpa pendidikan. Pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kreatifitas dan produktivitas masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kualitas kehidupan yaitu mengurangi angka kematian, meningkatkan status keluarga, meningkatkan kondisi kesehatan, meningkatkan pendapatan dan tentunya mengurangi jumlah kemiskinan. Pendidikan dapat

meningkatkan suatu keluarga terhadap pemahaman hidup, penyelesaian konflik dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dapat disimpulkan, kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan namun juga di sisi lain pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan. Konsep peranan pendidikan dalam upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya sebagai isu namun juga kekuatan dan pilar pembangunan. Pendidikan dianggap menjadi sarana paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan dapat memfokuskan kepada kemiskinan dengan memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan aspek pendidikan yang nantinya diharapkan dapat mengatasi dan memutus rantai kemiskinan tersebut. Kedua hal ini dapat menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada September tahun 2000, 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) salah satunya Indonesia menandatangani Deklarasi Milennium (The Millenium Declaration) yang berisi mengenai komitmen dalam mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan yang salah satu tujuannya adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mencapai pendidikan dasar untuk semua. Tujuan ini dikenal dengan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) dan disepakati untuk dicapai dalam kurun waktu 25 tahun. Di Indonesia sendiri, MDGs memprioritaskan penanggulangan kemiskinan melalui melalui peningkatan kesehatan penduduk, terutama kesehatan ibu dan anak; peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar bagi semua; serta upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, dengan memperhatikan kesetaraan jender. Pada aspek pendidikan, Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar.

Salah satu upaya pemerintah yang sejalan dengan tujuan MDGs dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Perlindungan sosial tersebut dapat berbentuk bantuan sosial maupun sistem jaminan sosial sedangkan akses pelayanan dasar menekankan pada tercukupi nya pendidikan, kesehatan, air bersih serta pangan dan gizi yang akan mengurangi biaya penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah dengan memfokuskan fungsinya pada pendidikan adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga berupa pemberian uang tunai bagi keluarga yang masuk ke dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RSTM) dengan beberapa syarat. kriteria penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) ini yaitu keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

Tujuan program keluarga harapan dalam bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak yang masuk ke dalam kategori rumah tangga sangat miskin atau RSTM khususnya di tingkat SD. SMP, dan SMA. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam aspek pendidikan, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki harapan dapat meningkatkan partisipasi keluarga miskin dengan keikutsertaan dalam pendidikan termasuk dengan menyekolahkan anaknya melalui manfaat yang diterima dari bantuan program tersebut. Sejalan dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan program keluarga harapan (PKH) dalam aspek pendidikan juga adalah untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas pendidikan anak dan kapasitas pendapatan anak di masa depan. Dengan adanya bantuan uang dalam program keluarga harapan ini diharapkan dapat merubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian dan dukungan besar kepada pendidikan anak mereka sehingga dapat mengurangi jumlah anak putus sekolah dan kasus pekerja anak. Program ini juga dapat mempercepat tujuan dari MDGs.

Program Keluarga Harapan atau PKH diluncurkan pada tahun 2007, penerima program yang dipilih adalah keluarga yang masuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin dan berada dibawah 80 persen garis kemiskinan yang resmi pada saat itu. Pada awalnya cakupan program ini masih sangat rendah, hingga pada tahun 2012 telah menjangkau 1,5 juta keluarga miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kementerian sosial republik indonesia (2019) bahwa pada tahun 2010 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan target penerima program PKH sehingga pada tahun 2016 telah mencapai 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar 10 Triliun, dan tahun 2019 sudah mencapai 10 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar 32 triliun. Hal ini menunjukan bahwa cakupan penerima program keluarga harapan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan jumlah anggaran yang besar tersebut menunjukan bahwa program keluarga diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebagai salah satu program pembangunan Nasional. Dinas Sosial Provinsi Lampung menyatakan bahwa di provinsi Lampung sendiri, Program keluarga harapan atau PKH mulai berjalan pada tahun 2011. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu penerima dari Program keluarga harapan atau PKH dari total 15 Kabupaten/kota yang terdaftar. Untuk Kabupaten Lampung Selatan , pada tahun 2022 ini, jumlah penerima manfaat sekitar 51.917 orang dari

17 Kecamatan di Seluruh Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Palas menjadi salah satu dari kecamatan dengan total 21 Desa yang terdaftar dalam program tersebut. Dari 21 Desa tersebut, Desa yang menjadi fokus penelitian adalah Desa Tanjung jaya.

Tabel 1. Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Jaya

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanjung jaya		
Komponen Pendidikan (SD, SMP dan SMA)	110 Keluarga	
Komponen Kesejahteraan Sosial (Lansia dan Distabilitas)	47 Keluarga	
Jumlah	187 Keluarga	

Sumber: Dinas Sosial Kecamatan Palas

Desa Tanjung Jaya merupakan Desa dengan penerima PKH terbanyaknya yaitu pada komponen pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa penduduk di Desa tersebut yang berada dibawah garis kemiskinan paling banyak berasal dari keluarga yang memilki anak usia sekolah. Selain itu, di Desa Tanjung Jaya terdapat banyak keluarga yang memilki anak dalam usia sekolah namun tidak disekolahkan karena terhambat biaya akibat kemiskinan. Belum lagi, pemahaman keluarga terhadap pentingnya anak dalam mengenyam pendidikan masih rendah. Mereka cenderung menyekolahkan anaknya hanya pada tingkat sekolah dasar padahal pemerintah menganjurkan program wajib belajar 12 tahun. Akibat hal ini muncul banyak kasus anak putus sekolah di Desa Tanjung Jaya. Tercatat pada tahun 2024, jumlah anak putus sekolah di Desa Tanjung Jaya adalah 26 anak, 14 diantaranya berasal dari keluarga miskin. Anak-anak tersebut berakhir menjadi pekerja anak. Selain karena keterhambatan biaya, kasus putus sekolah juga muncul karena rendahnya kepedulian keluarga terhadap pendidikan anakanaknya, mereka menganggap bahwa tingkat pendidikan yang tinggi bukan hal penting yang perlu dicapai. Hal ini menujukan bahwa partisipasi keluarga miskin dalam pendidikan di Desa Tanjung Jaya masih terbilang rendah., akibatnya partisipasi pendidikan yang seharusnya menjadi langkah dalam membangun modal manusia untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin sulit

terealisasikan dan peluang mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik semakin berkurang.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan, bantuan tunai yang diberikan diharapkan dapat mengurangi pengeluaran biaya keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, dan pendampingan serta berbagai kegiatan penyuluhan dari program tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada keluarga miskin akan pentingnya pendidikan, sehingga partisipasi keluarga miskin dalam pendidikan akan meningkat dan kasus putus sekolah maupun pekerja anak dapat diatasi dan keluarga miskin tersebut dapat memilki potensi untuk berkembang serta keluar dari lingkaran kemiskinan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan melihat apakah Program Keluarga Harapan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Partisipasi Pendidikan keluarga Miskin di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan". Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dan sebagai referensi bagi pembaca secara umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya masih rendah.
- Partisipasi pendidikan yang rendah akibat kemiskinan menimbulkan kasus anak putus sekolah dan pekerja anak di Desa Tanjung Jaya dan Program Keluarga Harapan ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 3. Keluarga penerima manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tanjung Jaya sebagian besar adalah kriteria pada komponen pendidikan hal ini

menunjukan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut menekankan pada pemberantasan masalah pendidikan di keluarga miskin

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, peneliti perlu melakukan pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

- Penelitian hanya difokuskan pada peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya.
- 2. Responden penelitian adalah keluarga miskin yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan di Desa Tanjung Jaya
- 3. Penelitian hanya difokuskan pada Desa Tanjung Jaya dan tidak melibatkan wilayah lain di sekitarnya.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Tanjung Jaya, partisipasi keluarga miskin dalam pendidikan masih terbilang rendah dan Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga dengan ini rumusan masalah penelitian adalah apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dalam pengetahuan serta menjadi referensi untuk penelitian sejenis terutama yang berkaitan dengan geografi sosial dan kependudukan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.
- Bagi Guru dan Siswa SMA/MA, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam mata pelajaran geografi di SMA terutama pada materi dinamika penduduk
- c. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan terutama untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pada keluarga miskin dengan tepat sasaran.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ruang lingkup objek penelitian adalah peran Program Keluarga Harapan
 (PKH) dalam partisipasi pendidikan keluarga miskin
- 2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah keluarga miskin yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Ruang lingkup waktu penelitian tahun 2024
- 5. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah geografi sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Geografi

Berdasarkan hasil Seminar dan Lokakarya (SEMLOK) ahli geografi tahun 1988 di Semarang, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono dan Moch. Amien, 2013:19). Ilmu Geografi terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan tidak dapat dibedakan hanya geografi fisik dan geografi manusia, tetapi sebagai ilmu dinamis yang berinteraksi dengan ilmu lain. Pradigma baru geografi, terutama Geografi Manusia, berpendapat bahwa geografi tidak hanya didefinisikan sebagai ilmu tentang ruang, tetapi sebagai ilmu pada epistemologi modern yang menaruh perhatian pada aktifitas manusia (Taher, 2017).

Geografi sebagai ilmu memilki aspek dan ruang lingkup kajian yang menyebabkan geografi memerlukan ilmu bantu untuk mempelajari bumi dengan segala isi dan gejala atau fenomena di dalamnya (Setyaningsih, 2019). Aspek dan kajian tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

a) Aspek Fisik

Aspek fisik kajian Geografi meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, dan erupsi gunungapi. Secara garis besar aspek fisik kajian Geografi dibedakan sebagai berikut.

- 1. Aspek topologi, yaitu aspek kajian yang membahas objek-objek berkaitan dengan letak wilayah, bentuk muka Bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu
- 2. Aspek biotik, yaitu aspek kajian yang membahas karakter fisik manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkup biosfer.
- 3. Aspek nonbiotik, yaitu aspek kajian yang membahas batuan, tanah, air, dan atmosfer.

b) Aspek Nonfisik

Aspek nonfisik kajian Geografi mencakup manusia dengan segala aktivitasnya, seperti kependudukan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek kajian nonfisik menitikberatkan pada kajian manusia dengan memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya oleh karena itu objek nonfisik disebut juga sebagai geografi manusia. Pada perspektif geografi manusia, kajian tentang ruang saat ini sedikit banyak telah terpengaruh oleh adanya modernisasi dan globalisasi. Konsep ruang yang selama ini dihayati oleh paradigma geografi tradisonal, bahwa ruang adalah ruang fisik sebagai material pada muka bumi, telah berubah menjadi kesadaran wilayah (regional consciousness) yang dibentuk oleh aktifitas manusia (Taher, 2017). Dalam hal ini ruang adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia termasuk diri manusia itu sendiri. Secara garis besar aspek nonfisik kajian Geografi dibedakan sebagai berikut.

- Aspek ekonomi, yaitu aspek yang membahas industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar.
- 2. Aspek budaya, yaitu aspek yang membahas pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian.
- 3. Aspek politik, yaitu aspek yang membahas kepartaian dan pemerintahan.
- 4. Aspek sosial, yaitu aspek yang membahas adat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial.

Pendekatan baru pada kajian geografi sosial tidak membatasi konsep ruang sebagai bentang lahan tetapi telah jauh merambah pada ruang sosial, ruang

masyarakat, ruang keluarga, dan ruang individu (Taher, 2017). Contoh dari kajian geografi sosial yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan dalam konteks geografi sosial sering kali berkaitan dengan distribusi dan lokasi geografis nya. Kemiskinan berkaitan dengan suatu lokasi, contohnya kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan sering terkait dengan akses terhadap sumber daya yang rendah dan infrastruktur yang terbatas. Dari keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap kualitas penduduk misalnya tingkat pendidikan/penguasaan ilmu pengetahuan & teknologi, tingkat kesehatan serta prasarana & sarana transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lain disekitarnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan strategi dalam menangani kemiskinan salah satunya melalui bantuan sosial berbasis keluarga, dimana penerima bantuan tersebut berada pada suatu ruang yaitu yaitu ruang keluarga yang merupakan bagian dari ruang masyarakat. Sehingga, pada babak baru penelitian geografi permasalahan ini menjadi bagian dari geografi manusia yaitu geografi sosial

2.1.2 Kemiskinan

a) Definisi Kemiskinan

Secara garis besar, Badan Pusat statistik memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Nugraheni (2020) bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) Menurut Soekanto (2015) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf

kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2020) menyatakan bahwa kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standar hidup tertentu. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah sebuah kondisi seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara ekonomi sehingga tidak memenuhi standard an taraf hidup yang ditentukan dalam suatu kelompok. Sedangkan penduduk miskin adalah kelompok masyarakat dengan ketidakmampuan secara ekonomi yang ditandai dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

b) Klasifikasi Kemiskinan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang perbedaannya terletak pada standar penilaiannya (TNP2K, 2020).

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan absolut atau kemiskinan mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum yang dianggap layak di satu daerah pada waktu tertentu. Pada konsep ini seseorang disebut miskin jika kehidupannya dianggap lebih rendah daripada tingkat kehidupan layak. Kehidupan layak menjadi garis pemisah antara miskin dan tidak miskin, atau dengan garis kemiskinan. Kemiskinan absolut bisa dipahami sebagai perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang disebut miskin, menurut konsep kemiskinan absolut, jika tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan,

perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk bisa hidup layak dan bekerja secara optimal.

2. Kemiskinan Relatif

Berbeda dengan garis kemiskinan absolut yang bergantung pada nominal yang diperlukan untuk memenuhi biaya hidup, garis kemiskinan relatif bergantung pada kesepakatan masyarakat mengenai kelompok masyarakat termiskin. Jika kesepakatan tercapai, garis kemiskinan bisa ditetapkan. Misalnya, 20 persen kelompok masyarakat terbawah yang diurutkan berdasarkan pendapatan atau pengeluaran. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antardaerah dan antarwaktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Namun untuk menentukan sasaran program yang ditujukan untuk penduduk miskin, ukuran kemiskinan relatif bisa digunakan.

c) Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas (2018) faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu: jk

- Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- 2. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- 3. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- 4. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- 5. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang

juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang

d) Karakteristik Kemiskinan

Menurut Bhinadi (2017) bahwa alat ukur yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan seseorang seperti yang digunakan oleh Bappenas yaitu dengan menggunakan indikator kemiskinan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- 2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
- 3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- 4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
- Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
- 6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.

- 7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
- 8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
- 10. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- 11. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Selanjutnya, dalam Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas (2018), penduduk miskin memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut:

- 1. Kondisi geografis, dimana tingkat kemiskinan tertinggi umumnya berada di wilayah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung memiliki pendapatan dan daya konsumsi yang rendah, menderita kekurangan gizi, buta huruf, tinggi resiko terhadap kematian bayi, dan standar perumahan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia yaitu tingkat kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan yang menjangkau daerah-daerah sulit wilayah perdesaan
- Karakteristik demografis, dimana rumah tangga miskin cenderung memiliki ukuran keluarga yang besar dengan jumlah anak yang lebih banyak. Namun, dengan pendapatan anggota keluarga yang terbatas dan jumlah tanggungan

- yang tinggi menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh anggota keluarga.
- 3. Karakteristik aset. Pendapatan seseorang memiliki keterkaitan dengan aset yang dimiliki, seperti lahan dan juga kualitas sumber daya manusianya. Dalam perekonomian yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian seperti Indonesia, lahan merupakan salah satu aset penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi.

e) Keterkaitan Kemiskinan Dan Pendidikan

Ragrar Nurkse (1953) dalam buku Teori Pembangunan (Hardjanto, 2011) menyatakan bahwa kemiskinan dapat membentuk sebuah lingkaran kemiskinan, teori ini disebut dengan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan atau *Vicious Cycle of Poverty* dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa dengan tingginya angka kemiskinan dapat mempengaruhi akses pendidikan, kualitas pendidikan dan rendahnya tingkat pendidikan serta dapat memperburuk kemiskinan. Teori ini juga menyatakan bahwa keterbelakangan, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas yang akhirnya berdampak pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi ini bisa berupa investasi kapital dengan ukuran konsumsi maupun investasi sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan.

Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran kemiskinan ini. *Nurkse* mengatakan bahwa jalan untuk melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan yaitu dengan modal dan investasi (capital). Hal ini juga diungkapkan oleh Jeffrey Sachs (2005) bahwa dalam menuntaskan kemiskinan dibutuhkan sebuah modal atau human capital dimana sumber daya manusia dapat menjadi sebuah investasi dalam memutus tali kemiskinan melalui pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pendidikan juga menjadi sasaran utama pada tahapan pembangunan. Dimana dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human development*) sumber daya manusia menjadi modal dasar dan utama untuk kesejahteraan.

Kemiskinan bukan lagi sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi lebih kompleks lagi, yaitu menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack Of knowledge and skills*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource or human capability*) (Ustama, 2009)

Elemen dasar *human capability* adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Ustama, 2009)

Terkait dengan pendidikan, serta sejalan dengan tujuan di dalam Millenium Development Goals (MDGs) bahwa peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada human capability dengan empat indikator yang digunakan, yaitu:

- 1) Angka melek huruf (*literacy rate*),
- 2) Angka partisipasi sekolah (school enrollment ratio) dan
- 3) Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*)

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang

hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang lain, pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi. Ustama (2009) menjelaskan tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Tingkat pendidikan sekolah tersebut terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

f) Strategi Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjamin dan kemiskinan menjadi alasannya rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. Kemiskinan selalu menjadi tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Fitri, 2019). Oleh karena itu, pemerintah telah merancang berbagai strategi dalam mengatasi kemiskinan.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011), Secara nasional maupun di tingkat daerah, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu:

1. Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil. Tingginya tingkat kerentanan menyebabkan tingginya kemungkinan penduduk menjadi miskin. Untuk mencegah semakin besarnya kemungkinan itu, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

2. Peningkatan akses pelayanan dasar;

Prinsip kedua adalah meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin yang terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang bidang ini efektif untuk mendorong penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang cukup sangat mungkin untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

4. Pembangunan yang inklusif.

Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan dampak penggandaan

(*multiplier effect*) pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup dan pengurangan angka kemiskinan.

Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi:

- (i) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (ii) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (iii) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan
- (iv) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Yaitu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (TNP2K, 2011)

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya, menjadi:

- Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya adalah memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.
- Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- 3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- 4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

2.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster Satu) yang berupa bantuan langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer). Program Keluarga Harapan ini juga dapat diartikan sebagai program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada RTSM, dengan syarat bahwa RTSM yang bersangkutan harus memeriksakan anggota keluarganya ke Puskesmas dan/atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.

Sedangkan menurut buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021) Program Keluarga Harapan atau yang disingkat PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial PKH sebagai salah satu

upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial PKH berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

b) Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Di dalam buku Panduan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021) Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan taraf hidup KPM terhadap akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, melalui
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan
- 5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM

Sedangkan menurut Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020, Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial yang akan meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- 2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sehingga akan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2011) PKH diharapkan bermanfaat untuk:

- Dalam jangka pendek, memberikan pengaruh pada pendapatan rumah tangga miskin (income effect) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin.
- 2. Dalam jangka panjang, memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui:
 - Peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (price effect anak keluarga miskin).
 - Memberikan kepastian kepada anak menyangkut masa depannya (insurance effect).
- 3. Merubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anak mereka.
- 4. Mengurangi jumlah pekerja anak.
- 5. Mempercepat pencapaian MDGs (melalui peningkatan akses pendidikan yaitu dengan meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, peningkatan kesehatan ibu hamil, pengurangan kematian balita, dan peningkatan kesetaraan jender)

c) Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan:

- 1. Bantuan Sosial PKH
- 2. Pendampingan PKH
- Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
 dan
- 4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

- Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- 3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

d) Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kriteria Penerima Manfaat PKH Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian berikut:

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah

a) Ibu hamil/nifas/menyusui

Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

b) Anak Usia Dini.

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen pendidikan yakni anak usia sekolah dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/Mi sederajat atau SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut mulai dari 60 (enam puluh) tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga

b) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga

Tabel 2. Nominal Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

	Kategori Penerima Bantuan	Nilai Bantuan		
	Periode 202			
Komponen	Ibu rumah tangga yang hamil dan/atau nifas	Rp. 750.000		
Kesehatan	Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun	Rp. 750.000		
Komponen	Anak Usia SD/Sederjat	Rp. 225.000		
pendidikan	Anak Usia SMP/Sederajat Anak Usia SMA/Sederajat	Rp. 375.000 Rp. 500.000		
Komponen	Penduduk lanjut usia mulai dari 60 tahun	Rp. 600.000		
Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas	Rp. 750.000		

Sumber: UPPKH Kecamatan Palas

Catatan: Bantuan per-KPM dibatasi maksimum Rp. 2.200.000 dan jumlah anak maksimum 3. Bantuan ini diberikan tiga bulan sekali.

2.1.4 Partisipasi Pendidikan

a) Pengertian Partisipasi Pendidikan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta di dalamnya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung percepatan tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan upaya uluran atau tawaran dari seseorang kepada orang lain bisa berupan gagasan pemikiran, ucapan perintah atau larangan, dan tindakan dalam rangka memberikan kemanfaatan terhadap orang lain (Suryana, dkk., 2022)

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dari pengertian tersebut maka partisipasi pendidikan dapat diartikan sebagai Keterlibatan dalam serangkaian usaha pendidikan. Partisipasi pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya memiliki kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan yang akan dicapainya secara individu atau pun secara kelompok yang secara aktif terlibat dalam memngambil alih (memberikan kontribusi) untuk kepentingan (pendidikan) secara umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, memonitoring, sampai pada pengevaluasian (Suryana, dkk., 2022)

b) Bentuk Partisipasi Pendidikan

Menurut Suryana, dkk. (2022) Partisipasi pendidikan memiliki tiga bentuk, yaitu:

a) Partisipasi dalam bentuk pikiran.

Partisipasi dalam bentuk pikiran dapat merujuk kepada keterlibatan suatu individu atau kelompok dengan memberikan gagasan, pandangan, atau pemikiran yang kontruktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi dalam bentuk pikiran ini biasanya terdapat dalam mengidentifikasi masalah, pencarian solusi alternatif serta perencanaan aksi dan juga mencakup cara berkontribusi

dengan berbagi pemikiran, penilaian, solusi atau pandangan terhadap suatu isu atau masalah. Partisipasi pikiran berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan sebuah solusi maupun perbaikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka bentuk partisipasi ini merujuk pada proses pemikiran melalui keterlibatan aktif dalam program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan dan pemberian pandangan mengenai pentingnya pendidikan melalui sikap dan perilaku.

b) Partisipasi dalam bentuk Tenaga.

Partisipasi dalam bentuk tenaga dapat terwujud dalam tahap pelaksanaan. Partisipasi dalam bentuk ini mengacu pada keterlibatan maupun kontribusi suatu individu atau kelompok dalam menjalankan suatu kebijakan dan mendukung setiap proses yang dilakukan. Jika dikaitkan dengan partisipasi pendidikan maka merujuk pada keterlibatan aktif siswa, pendidik, maupun individu lain dengan upaya fisik dalam konteks pembelajaran pendidikan. Partisipasi ini juga dapat ditunjukkan dengan upaya mendukung dan ikut serta dalam proses yang sedang dilaksanakan mengenai pendidikan.

c) Partisipasi Dalam bentuk Uang.

Partisipasi dalam bentuk uang merujuk pada keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam bentuk finansial atau sumber daya keuangan. Biasanya partisipasi dalam bentuk uang dilaksanakan ketika dalam satu program mengalami kekurangan. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka partisipasi dalam bentuk uang merujuk pada sumbangan dana maupun upaya membiayai pendidikan.

c) Peran Keluarga Dalam Pendidikan

Menurut Triwiyanto (2014:71) Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari dari ayah, ibu, dan anak. Hubungan yang terjadi dalam keluarga didasari atas dasar ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Hubungan dalam keluarga juga didominasi oleh suasana afeksi dan rasa tanggung jawab. Sementara itu, fungsi keluarga adalah memelihara, merawat, dan saling

melindungi. Terdapat tiga fungsi yang melekat sebagai ciri keluarga, yaitu sebagai berikut.

- 1. Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak oleh orang tuanya (fungsi biologis).
- 2. Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh kemesraan dan afeksi (fungsi afeksi).
- 3. Keluarga membentuk kepribadian anak (fungsi sosialisasi).

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelumnya manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian antropologis, disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah keluarga. Di lingkungan keluarga pula siswa akan mendapat nasehat atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar (Hidayat dan Abdillah, 2019:114)

Keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan (Anshory dan Utami, 2018), Berikut adalah beberapa peran keluarga dalam pendidikan:

- 1) Keluarga dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada anak untuk belajar dan meraih prestasi di sekolah.
- Keluarga dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, seperti menyediakan buku-buku dan alat tulis, serta memberikan waktu dan ruang yang cukup untuk belajar.
- Keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak, seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, yang dapat membantu anak dalam belajar dan kehidupan sehari-hari.
- 4) Keluarga dapat mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial.
- 5) Keluarga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah untuk memantau perkembangan anak dan memberikan dukungan yang dibutuhkan.

2.2 Penelitian Relevan

Dalam penelitian diperlukan referensi tambahan berupa penelitian terdahulu yang sejenis. Penelitian sejenis ini digunakan sebagai panduan dalam menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang relevan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

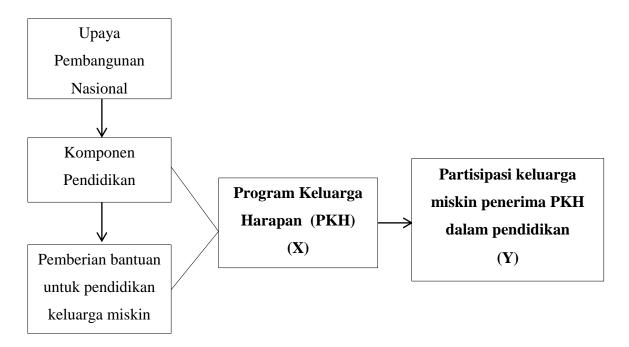
- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi pada tahun 2016 dengan judul "Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie". Tujuan penelitian untuk untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. Metode yang digunnakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel berjumlah 41 orang. Teknik analisis data menggunakan model persamaan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan PKH mampu menjelaskan atau mempengaruhi partisipasi pendidikan anak anak RTSM di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie mencapai 96,8 persen dan sisanya sebesar 3,2 persen di pengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini, baik secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa bantuan PKH berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pendidikan anak anak RTSM di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Faiz Aminuddin pada tahun 2016 dengan judul "Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Peserta Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)". Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan eknik pengumpulan data menggunakan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKH di Kecamatan Tayu berjalan sesuai target dan telah berhasil mencakup 268 anak peserta SMA/sederajat, hal ini membuktikan UPPKH Kecamatan Tayu ikut serta dalam peningkatan jenjang pendidikan anak dari KSM dengan jumlah tatap muka diatas angka 85%. Hal itu dikarenakan perencanaan program yang matang, kerja keras pendamping serta peran orang tua penerima manfaat bantuan PKH yang mampu mengaplikasikan sosialisasi dari para pendamping

- untuk mendorong anak-anak mereka untuk meningkatkan partisipasi ke dalam lembaga pendidikan.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Brayen Bakulu, Masje Pangkey, dan Helly Kolondam pada tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur" Metode yang digunanakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur belum sepenuhnya tercapai dilihat dari aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.
- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Sovie Seftia Fitri, Trisnaningsih, dan Sugeng Widodo pada tahun 2019 dengan judul "Pemanfaatan Bantuan PKH Pada Keluarga Miskin di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara" Metode yang digunanakan adalah metode deskriptif dengan sampel sebanyak 68. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur kuesioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa bantuan PKH kesehatan digunakan untuk memeriksakan imunisasi lengkap sebanyak 16, hanya 3 pemeriksaan kesehatan sebanyak 42 dan 10 mengikuti hanya 2 pemeriksaaan kesehatan. Bantuan PKH pendidikan digunakan untuk membeli buku, alat tulis serta spp sebanyak 100%, seragam sebanyak 79,41% dan biaya transportasi 29,41%.

2.3 Kerangka Berpikir

Pemerintah terus melakukan serangkaian usaha dan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut diwujudkan dengan upaya Pembangunan Nasional. Salah satu aspek penting yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional yaitu pemberantasan kemiskinan. Siklus kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat berimbas terhadap banyak hal seperti kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program salah satunya melalui program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan sosial berbasis keluarga yang dikeluarkan pemerintah dengan menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pada aspek pendidikan sendiri Program Keluarga Harapan memfokuskan pada pemberantasan kasus anak putus sekolah maupun pekerja anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan atau dipaksa berhenti oleh keluarganya karena terhambat biaya. Dengan pemberian bantuan untuk penduduk miskin dalam komponen pendidikan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya dan mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh keluarga sehingga kasus anak putus sekolah dan pekerja anak dapat terselesaikan. Selain itu, dengan pendidikan yang tinggi diharapkan menjadi sebuah bentuk investasi dimana sumber daya manusia menjadi modal untuk menuju Indonesia yang lebih maju dan berkualitas.

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran Program Keluarga Harapan tersebut dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga miskin. Sehingga kita akan tahu seberapa besar keinginan sebuah keluarga untuk terlibat dan ikut serta dalam pendidikan anaknya akibat adanya bantuan dri Program Keluarga Harapan pada komponen pendidikan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam menyikap suatu permasalahan dan diperlukan suatu uji kebenaran. Dalam penelitian ini hipotesis yang diambil yaitu :

- H₀ Tidak terdapat pengaruh pada Program Keluarga Harapan terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya
- H₁ Terdapat Pengaruh pada Program Keluarga Harapan terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya

III. METODE PENELITIAN

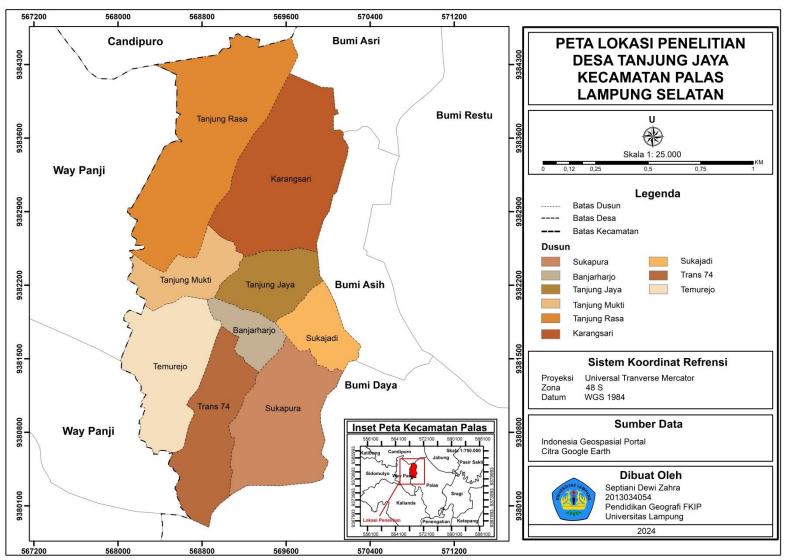
3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantatif dikarenakan data yang digunakan bersifat kuantitatif dengan analisis menggunakan statistik dan dijabarkan dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan atau PKH berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan keluarga miskin yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan. Data penelitian yang nantinya diperoleh berupa angka dari hasil pengumpulan data.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2018) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dankemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan di Desa Tanjung Jaya.

Tabel 3. Populasi Penelitian

No	Populasi Penelitian	Jumlah Populasi
1.	Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan	110 keluarga
	(PKH) pada komponen pendidikan di Desa	
	Tanjung Jaya	

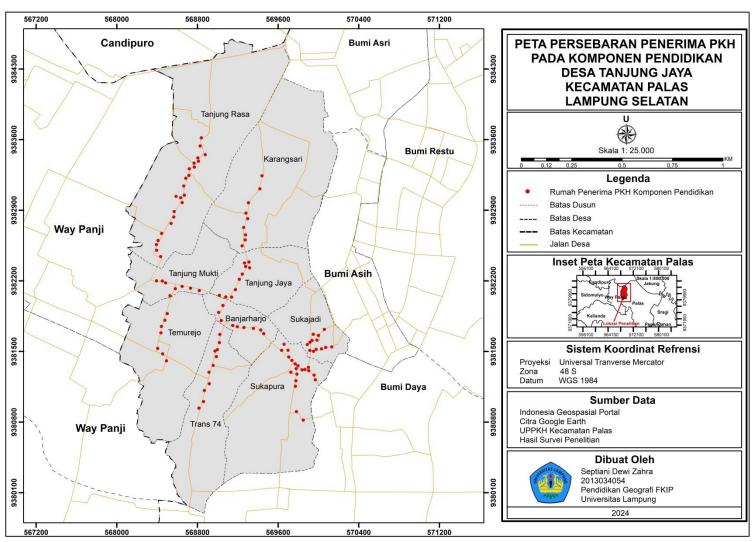
Sumber: UPPKH Kecamatan Palas

Jumlah keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan tersebut tersebar disetiap dusun yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penerima PKH Komponen Pendidikan/Dusun

No.	Dusun	Penerima PKH Komponen	
		Pendidikan/Dusun	
1.	Sukapura	20	
2.	Banjarharjo	9	
3.	Tanjung Jaya	10	
4.	Tanjung Mukti	8	
5.	Tanjung Rasa	23	
6.	Karangsari	9	
7.	Sukajadi	13	
8.	Trans 74	11	
9.	Temurejo	7	
	Jumlah	110	

Sumber: UPPKH Kecamatan Palas



Gambar 3. Peta Persebaran Penerima PKH Komponen Pendidikan Desa Tanjung Jaya

2) Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betulbetul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2018). Penentuan jumlah sampel ini menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel Yang Diperlukan

N = Jumlah Populasi

e = Tingkat kesalahan eror (sampling error) atau kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolelir, dalam penelitian ini adalah 5%.

Berdasarkan rumus Solvin tersebut perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$= \frac{110}{1+N(e)^2}$$

$$= \frac{110}{1+110(0,05)^2}$$

$$= \frac{110}{1,275}$$

$$= 86$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 86 Keluarga penerima PKH pada komponen pendidikan di Desa Tanjung Jaya.

Teknik pengambilan sampel menggunakan propotional random sampling yaitu pengambilan sampel secara proporsi yang dari setiap wilayah ditentukan seimbang dengan banyaknya subjek pada masing-masing wilayah meningat jumlah penerima PKH Komponen pendidikan pada tiap wilayah berbeda sehingga didapat jumlah sampel yang representatif. Jadi setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk diambil menjadi sampel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Dimana:

ni = Jumlah anggota sampel ditiap kelompok

n = Jumlah sampel seluruhnya

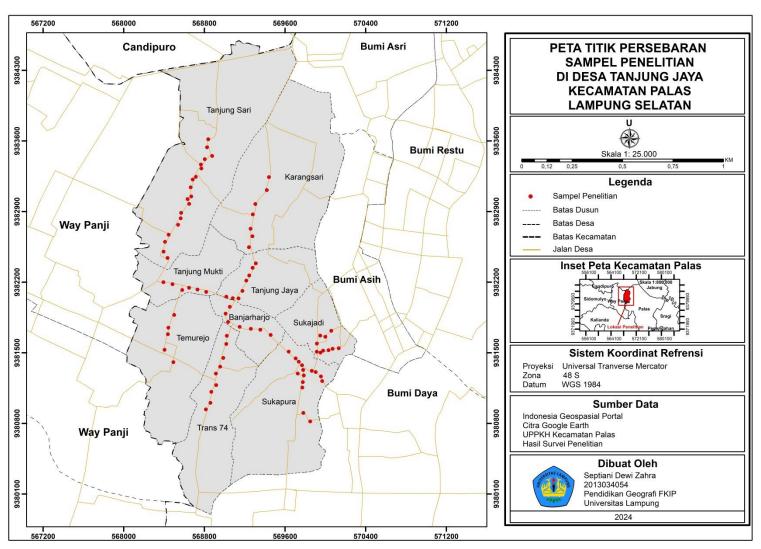
Ni = Jumlah anggota populasi ditiap kelompok

N = Jumlah populasi seluruhnya

Tabel 5. Sampel Penelitian

No.	Dusun	Populasi	Perhitungan	Jumlah Sampel
		Seluruhnya	Sampel	Penelitian
1.	Sukapura	20	$20/110 \times 86 = 15,63$	15
2.	Banjarharjo	9	$9/110 \times 86 = 7,03$	7
3.	Tanjung Jaya	10	$10/110 \times 86 = 7,81$	8
4.	Tanjung Mukti	8	$8/110 \times 86 = 6,25$	6
5.	Tanjung Rasa	23	$23/110 \times 86 = 19,78$	19
6.	Karangsari	9	$9/110 \times 86 = 7,03$	7
7.	Sukajadi	13	$13/110 \times 86 = 10,16$	10
8.	Trans 74	11	$11/110 \times 86 = 8,6$	9
9.	Temurejo	7	$7/110 \times 86 = 5,47$	5
	Jumlah	110		86

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti (2023)



Gambar 4. Peta Titik Persebaran Sampel Penelitian

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat Variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). variabel bebas atau variabel independen sering disebut sebagai stimulus, predictor, antecedent. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel terkait atau variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan atau PKH dan variabel terikat (Y) adalah partisipasi pendidikan keluarga miskin

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Program Keluarga Harapan (X)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin dimana penerima manfaat program ini akan menerima bantuan tunai sepanjang memenuhi syarat dan kewajibannya. Adapun indikator dari program keluarga harapan pada komponen pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Pemberian Bantuan sosial berupa tunai

Tujuan utama dari Program Keluarga harapan adalah memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal tertentu dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Uang tunai ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga terutama dalam pengeluaran untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Untuk komponen pendidikan, nominal uang bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH.

b) Pendampingan Program Keluarga Harapan

Pendampingan program keluarga harapan (PKH) dilakukan oleh pendamping PKH yang merupakan bagian dari UPPKH (unit pelaksana program keluarga harapan) yang di koordinator langsung oleh dinas sosial kabupaten. Pendamping PKH berperan sebagai penanggung jawab yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial, melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan. Pendampingan ini dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun desa.

c) Terdaftar dalam Program Bantuan Komplementer

Bantuan komplementer PKH (Program Keluarga Harapan) mengacu pada berbagai bentuk bantuan atau program tambahan yang diberikan secara bersamaan atau terkait dengan PKH untuk meningkatkan dampak dan efektivitasnya. Bantuan ini dirancang untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada keluarga penerima PKH dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan komplementer tersebut yaitu subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

3.5.2 Partisipasi Pendidikan (Y)

Dalam Pendidikan, PKH berfungsi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan yang dimaksud adalah keterlibatan keluarga miskin dalam pendidikan anak mereka dengan serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil untuk kemajuan pendidikan anak. Indikator dari bentuk partisipasi pendidikan (Suryana, dkk., 2022) adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi Dalam Bentuk Pikiran.

Dalam pendidikan, bentuk partisipasi ini merujuk pada proses pemikiran melalui keterlibatan aktif dalam program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pendidikan dan pemberian pandangan mengenai pentingnya pendidikan melalui sikap dan perilaku. Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maka partisipasi dalam bentuk pikiran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan. Dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan kepedulian keluarga miskin dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan mengakses layanan pendidikan yang diberikan pemerintah secara mandiri.
- 2. Meningkatkan kepedulian terhadap jenjang pendidikan anak yang lebih tinggi. Dengan adanya PKH diharapkan dapat meningkatkan motivasi orang tua untuk lebih memahami dan mendukung anaknya mencapai pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan sumber daya yang berkualitas dan dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan.

b) Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga.

Partisipasi pendidikan dalam bentuk tenaga merujuk pada keterlibatan aktif siswa, pendidik, maupun individu lain dengan upaya fisik dalam konteks pembelajaran pendidikan. Partisipasi ini juga dapat ditunjukkan dengan upaya mendukung dan ikut serta dalam proses yang sedang dilaksanakan mengenai pendidikan. Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga

Harapan (PKH) maka partisipasi dalam bentuk tenaga yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- Mendaftarkan anak usia sekolah untuk sekolah. Dengan hal ini maka akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, baik angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni sehingga tujuan MDGs dalam pendidikan dapat terwujud. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya dalam menuntaskan kasus putus sekolah dan kasus pekerja anak.
- 2. Mengikutsertakan anak dalam program wajib belajar 12 tahun, yaitu program wajib belajar sebagaimana yang diatur pemerintah dalam Undang-Undang. Program wajib belajar 12 tahun bertujuan agar penduduk dapat menjalani program pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3. Memastikan anak melek huruf yaitu bisa menulis dan membaca dengan baik. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan angka melek huruf yang menjadi tujuan dari MDGs juga tujuan PKH terkait pendidikan.
- 4. Memastikan anak sekolah dengan tingkat kehadiran tertentu. Dalam hal ini keluarga perlu memonitor anak untuk hadir dalam proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah sehingga proses pembelajaran tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas anak dalam pendidikan. Selain itu, hal ini juga menjadi salah satu syarat KPM PKH untuk mendapatkan bantuan pendidikan.

c) Partisipasi Dalam Bentuk Uang.

Partisipasi pendidikan dalam bentuk uang merujuk pada sumbangan dana maupun upaya membiayai pendidikan. Untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maka partisipasi dalam bentuk pikiran yang diharapkan adalah sebagai berikut:

 Memanfaatkan uang bantuan PKH untuk biaya sekolah, yaitu untuk biaya pendaftaran, pembayaran uang sekolah bulanan atau tahunan maupun biaya lainnya yang terkait dengan pendidikan formal. Uang bantuan harus

- dipakai sesuai dengan ketentuan PKH agar tujuan pemberian bantuan PKH untuk pendidikan berjalan dengan efektif.
- 2. Memanfaatkan uang bantuan PKH untuk membeli keperluan sekolah, baik alat-alat sekolah maupun keperluan sekolah lainnya seperti buku, tas, dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi keefektifan proses pembelajaran yang dilakukan anak sehingga tujuan bantuan PKH dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas melalui peningkatan keterampilan dan potensi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan dapat terwujud.

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Instrumen	Pengukuran
1.	Program	Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Pemberian Bantuan Sosial berupa tunai	Lembar	Skala Likert
	Keluarga	adalah program perlindungan sosial	- Mendapatkan bantuan uang tunai	Kuesioner	
	Harapan	melalui pemberian bantuan tunai	2. Pendampingan Program Keluarga		
	(PKH)	kepada keluarga sangat miskin yang	Harapan (PKH)		
	(X)	dimana penerima manfaat program	- Memastikan bantuan tepat jumlah dan tepat		
		ini akan menerima bantuan tunai	waktu		
		sepanjang memenuhi syarat dan	- Melaksanakan pertemuan peningkatan		
		kewajibannya. Dalam komponen	kemampuan keluarga (P2K2)		
		pendidikan PKH berfungsi untuk	- Melaksanakan fungsi pengaduan dan		
		meningkatkan partisipasi pendidikan	penanganan		
		termasuk juga usaha pemberantasan	3. Terdaftar program bantuan komplementer		
		kasus putus sekolah dan pekerja anak	- Anak mendapatkan bantuan tambahan pada		
			bidang pendidikan di sekolah		

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Variabel	Definisi	Indikator	Instrumen	Pengukuran
2.	Partisipasi	Partisipasi pendidikan keluarga	1. Partisipasi pendidikan dalam bentuk pikiran	Lembar	Skala Likert
	Pendidikan	miskin adalah peran dan	- Perilaku kemandirian dalam mengakses	Kuesioner	
	(Y)	keterlibatan keluarga miskin	pendidikan		
		dalam pendidikan anak mereka	- Kepedulian terhadap jenjang pendidikan anak		
		dengan serangkaian tindakan dan	yang lebih tinggi		
		keputusan yang diambil oleh	2. Partisipasi pendidikan dalam bentuk tenaga		
		keluarga untuk memastikan akses,	- Mendaftarkan anak usia sekolah untuk sekolah		
		dan kemajuan pendidikan anak-	- Mengikutsertakan anak dalam wajib belajar 12		
		anak mereka. Partisipasi tersebut	tahun		
		disesuaikan dengan ketentuan	- Memastikan anak melek huruf		
		program keluarga harapan (PKH)	- Memastikan anak sekolah dengan tingkat		
			kehadiran yang sesuai		
			3. Partisipasi pendidikan dalam bentuk uang		
			- Memanfaatkan uang bantuan PKH untuk biaya		
			sekolah		
			- Memanfaatkan uang bantuan PKH untuk		
			membeli keperluan sekolah		

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini tidak terbatas pada orang. Observasi dilakukan apabila penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2018). Observasi yang dilakukan yaitu dengan mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian untuk mengetahui bagaimana keadaan keluarga miskin penerima PKH pada komponen pendidikan

3.6.2 Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, kusioner digunakan untuk mengetahui pemahaman keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan terhadap bantuan yang diberikan untuk tujuan meningkatkan partisipasi pendidikan juga bagaimana partisipasi yang dilakukan keluarga terhadap pendidikan atas bantuan tersebut.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena penelitian. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan partisipasi pendidikan keluarga miskin.

3.7.1 Kuesioner Program Keluarga Harapan (PKH)

Kuesioner Program Keluarga Harapan digunakan untuk mengukur pelaksanaan program keluarga harapan dan hak-hak keluarga penerima manfaat PKH. Kuesioner ini dibuat dengan tiga indikator dengan jumlah 21 butir pertanyaan yang tiap indikatornya terdiri dari 7 pertanyaan. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut:

Tabel 7. Kisi-kisi Intrumen Program Keluarga Harapan

	Nomor Butir Pertanyaan			
No	Indikator	Positif	Negatif	Jumlah
1.	Pemberian Bantuan Sosial	1, 2, 3, 4	5,6	6
	berupa tunai			
2.	Pendampingan Program	7,8,9,10	11, 12	6
	Keluarga Harapan (PKH)			
3.	Terdaftar program bantuan	13, 14, 15, 16	17, 18	6
	komplementer			
	Jumlah	12	6	18

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti (2023)

3.7.2 Kuesioner Partisipasi Pendidikan

Kuesioner Program Keluarga Harapan digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan keluarga miskin yang terdapat dalam program Keluarga Harapan (PKH). Kuesioner ini dibuat dengan tiga indikator dengan jumlah 21 butir

pertanyaan yang tiap indikatornya terdiri dari 7 pertanyaan. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut:

Tabel 8. Kisi-Kisi Intrumen Partisipasi Pendidikan

		Nomor Butir Pertan	ıyaan	
No	Indikator	Positif	Negatif	Jumlah
1.	Partisipasi pendidikan dalam	19, 20,21,22	23,24	6
	bentuk pikiran			
2.	Partisipasi pendidikan dalam	25,26,27,28	29,30	6
	bentuk tenaga			
3.	Partisipasi pendidikan dalam	31,32,33,34	35,36	6
	bentuk uang			
	Jumlah	12	6	18

Sumber: Hasil Pengolahan Data Oleh Peneliti (2023)

Kuesioner yang dibuat dalam penelitian menggunakan skala likert. Adapun bobot skor dari masing-masing jawaban berdasarkan modifikasi skala likert yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Kategori Skor Jawaban Kuesioner

No	Alternatif Jawaban	Skor	
1.	Sangat Setuju	4	
2.	Setuju	3	
3.	Tidak Setuju	2	
4.	Sangat Tidak Setuju	1	

Sumber: Sugiyono (2018)

3.8 Uji Prasyarat Instrumen

Dalam menganalisis data penelitian perlu adanya uji validitas dan reliabilitas sebagai langkah pertama pada data yang diperoleh atau hasil dari jawaban angket yang telah dibagikan kepada responden. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas yaitu sebagai berikut:

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018) Valid berarti alat ukur yang digunakan mendapat data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah instrumen tersebut dapat dikatakan valid apabila instrumen mampu mengungkapkan data dari variabel dengan tetap dan tidak menyimpang dari keadaan sebenarnya. Validitas alat ukur diuji dengan menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari setiap butir pernyataan dengan keseluruhan yang diperoleh pada alat ukur tersebut.

Interpretasi dalam pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel pada taraf kesalahan 5%. Adapun ketentuan dalam melakukan pengujian validitas pada instrumen ini adalah sebagai berikut.

- Jika r hitung > r tabel maka butir pernyataan dinyatakan valid
- Jika r hitung < r tabel maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid.

Teknik pengujian validitas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus *pearson product momen.* Adapun rumusnya, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

rxy = Koefisien korelasi pearson validitas

x =Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan

y = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan

n = Banyaknya jumlah/subjek responden.

Setelah mengetahui hasil dari rumus *pearson product momen*, kemudian peneliti melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika r hitung ≥ r tabel maka instrumenn dinyatakan valid. Dalam memudahkan uji coba menegnai penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 24. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (1) Masukan data dan skor total yang telah dihitung; (2) Kemudian klik *Analize* > *Correlate* > *Bivariate*; (3) Masukan

sluruh item ke dalam kotak variabels; (4) klik *Person* > OK. Uji validitas ini diberikan kepada 24 responden di luar sampel yang diambil dari keseluruhan populasi.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018) bahwa reliabilitas adalah hasil penelitian yang dimana terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila instrumen penelitian tersebut memiliki hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus koefisien Alpha yaitu sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right)$$

Keterangan:

 r_{11} = Koefisien reliabilitas instrumen

k = Jumlah item pertanyaan

 $\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir

 σ_t^2 = Varian total

Butir instrumen dinyatakan realiabel jika nilai koefisien keandalan > 0.6 dan butir instrumen dinyatakan tidak reliabel jika < 0.6.

Uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien Alpha atau *Alpha Cronbach* dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 24. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pengujian reabilitas pada penelitian ini yaitu: (1) Masukkan data yang sama pada saat melakukan uji validitas; (2) *Analize* > *Scale* > *Reability Analysis*; (3) Masukkan nomor item yang valid, untuk skor total tidak perlu dimasukkan; (4) Klik *Statistics*, pada bagian kotak dialog *Deskriptives for* klik *scala if item deleted* > Continue > OK.

3.9 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dari seluruh responden kemudian disajikan untuk membantu menjawab permasalahan yang diteliti.

3.9.1 Uji Prasyarat Analisis Data

Uji prasyarat analisis ini dilakukan karena analisisnya menggunakan statistik Parametris. Pada statistik parametris perlu dilakukan uji asumsi karena data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas dan uji linearitas karena analisis akhir dari penelitian ini adalah regresi linier sederhana.

a) Uji Normalitas

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka harus dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui nilai residu atau perbedaan yang ada dalam penelitian terdistribusi dengan normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan SPSS. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan Uji Normalitas pada penelitian ini yaitu: (1) Masukkan data tabulasi dari kedua variabel; (2) Cari nilai residual dengan klik *Analize* > *Regression* > *Linear*; (3) Masukkan data ke dalam kolom variabel yang sesuai; (4) Klik *Save* > Checklist *Unstandardized* > *Continue* > OK; (5) Setelah nilai residual muncul klik *Analize* > *Nonparametric tests* > *Legace Dialogs* > *1-Sample K-S*; (6) masukan data *Unstandardized* > OK.

Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. > 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal
- Jika nilai Sig. < 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal

b) Uji Lineritas

Uji linearitas merupakan uji yang digunakan untuk menyatakan bahwa persamaan linier cocok digunakan pada data yang ada. Sehingga dapat diketahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat apakah memilki hubungan linear secara signifikan atau tidak. Uji linearitas pada penelitian dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA dengan bantuan SPSS untuk memperoleh koefisien signifikansinya. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan Uji Linearitas pada penelitian ini yaitu: (1) Masukkan data tabulasi dari kedua variabel; (2) Klik *Analize* > *Compare Means* > *Means*; (3) Masukkan data ke dalam kolom variabel yang sesuai; (4) Klik *Options* > Checklist *Test for linearity* > *Continue* > OK

Dasar pengambilan keputusan hasil uji linearitas tersebut yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. > 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y
- Jika nilai Sig. < 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan variabel Y

3.9.2 Uji Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran hipotesis tersebut perlu dibuktikan melalui data yang sudah terkumpul yang kemudian akan diuji. Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2018) adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

Keterangan:

Y': nilai yang diprediksikan

a : konstanta atau bila harga X =

b : koefisien regresi, yaitu yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X : variabel independen.

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana, yaitu:

- a) Apabila nilai signifikasi (Sig.) < probabilitas 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya, Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap partisipasi Pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya
- Apabila nilai signifikasi (Sig) > probabilitas 0,05 maka H₀ diterima dan H₁ ditolak. Artinya, Program Keluarga Harapan tidak berpengaruh terhadap partisipasi Pendidikan keluarga miskin di Desa Tanjung Jaya

Untuk memudahkan uji dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 24. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan Uji Regresi Linier Sederhana yaitu: (1) Masukkan data tabulasi dari kedua variabel; (2) Klik Analize > Regression > Linear; (3) Masukkan data ke dalam kolom variabel yang sesuai; (4) Klik OK.

3.10 Teknik Pengukuran Data

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Dengan adanya skala interval maka dapat menghasilkan rentangnilai yang bermakna. Skala interval ini digunakan untuk mengukur hasil data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu pelaksanaan Program Keluarga Harapan (X) dan pelaksanaan partisipasi pendidikan (Y)

Menurut Anandha dan Fadhli (2018) perhitungan skala interval dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sturgges yaitu sebagai berikut:

• Rentang (Range) : Nilai terbesar – Nilai terkecil

• Banyak Kelas Interval : 1 + 3,3 log n

• Panjang Kelas Interval : $\frac{Rentang}{Banyak Kelas}$

Untuk menghasilkan pembahasan mengenai perbandingan pada hasil penelitian maka pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

 $Interval \ Kelas \qquad \qquad : \frac{\textit{Nilai Tertinggi-Nilai Terendah}}{\textit{Jumlah Kelas}}$

V. KESMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pada Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap partisipasi pendidikan Keluarga Miskin di Desa Tanjung Jaya dengan pengaruh yang bersifat positif, dimana apabila pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kenaikan maka Partsipasi Pendidikan juga akan mengalami peningkatan. Jika ditinjau berdasarkan wilayah, PKH memilki pengaruh terhadap partisipasi pendidikan di tiap dusun yang ada di Desa Tanjung Jaya dengan besaran pengaruh yang berbeda-beda, dimana paling tinggi berada di dusun Karangsari dan paling rendah yaitu di dusun Banjarharjo. Sedangkan untuk rata-ratanya, pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan di Desa Tanjung Jaya masuk ke dalam kategori sedang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh seberapa baik pelaksanaan PKH dan pelaksanaan partisipasi pendidikan yang dilakukan keluarga miskin pada tiap dusun sebagai wujud pemahaman dari pemanfaatan bantuan PKH untuk tujuan pendidikan. Dengan demikian, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Jaya dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan keluarga miskin sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memutus rantai kemiskinan pada keluarga miskin dengan meningkatkan kualitas pendidikan dapat direalisasikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang tepat dengan memfokuskan pada pemberian bantuan yang efektif bagi keluarga miskin.
- 2. Bagi Dinas Sosial dan UPPKH Kecamatan Palas, sebagai unit pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat melakukan pembaruan data setiap tahunnya untuk memastikan bahwa keluarga yang terdaftar sebagai penerima PKH tepat sasaran. Selain itu, diharapkan juga melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk menjamin transparansi dalam pelaksanaan PKH.
- 3. Bagi pendamping PKH dan perangkat desa yang terlibat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Jaya, diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang efektif terhadap keluarga penerima manfaat PKH untuk memastikan bahwa telah memahami tujuan dan manfaat dari program ini.
- 4. Bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan untuk memanfaatkan dana yang telah diberikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan mengetahui sanksi maupun kewajibanya sebagai penerima PKH serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKH sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Bagi Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan, diharapkan dapat terus meningkatkan partisipasi pendidikan dan lebih peduli pada kualitas pendidikan anak untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga melalui peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, F., & Syir'ah, A. T. 2016. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 5(2), 217-241.
- Ananda, R., & Fadhli, M. 2018. Statistik pendidikan: teori dan praktik dalam pendidikan. Medan: CV.Widya Puspita
- Anshory dan Utami. 2018. *Pengantar Pendidikan*. Malang: UMM Press Badan Pusat Statistik. 2023. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html (diakses pada 12 Juli 2023)
- Bakulu, B., Pangkey, M., & Kolondam, H. 2021. Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(101).
- Bhinadi, A. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Depublish.
- CNN Indonesia. 2022. *RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia*. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220930123851-532-854651/rimasuk-100-negara-paling-miskin-di-dunia (diakses pada 7 Juli 2023)
- Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Fitri, S. S., Trisnaningsih, T., & Widodo, S. 2019. Pemanfaatan Bantuan PKH Pada Keluarga Miskin di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara. *Jurnal Penelitian Geografi (JPG)*, 7(6).
- Hardjanto, Imam. 2011. Teori Pembangunan. Malang: UB Press.
- Hidayat, R. dan Abdillah, A. 2019. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: LPPPI
- Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 2018. Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. Jakarta Pusat: Kementerian PPN/Bappenas

- Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020.
- Khoiriah, Siti. 2023. Kuota Penerima PKH 2023 di Lampung. https://kupastuntas.co/2023/02/27/kuota-penerima-pkh-tahun-2023-di-lampung-420940-kpm (diakses pada 7 Juli 2023)
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. 2020. *Metode penelitian kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugraheni, I. L. 2020. Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Geografi*, 8(1), 28-34.
- Nursita, L. 2022. Pendidikan pekerja anak: dampak kemiskinan pada pendidikan. *Jambura economic education journal*, 4(1), 1-15.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan
- Rusydi, R. 2017. Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 17(1), 77-84.
- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. 2019. Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *3*(3), 1542-1548.
- Setyaningsih, Puput. 2019. Prinsip dan Lingkup Geografi. Klaten: Cempaka Putih
- Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suharyono, A., & Amien, M. 2013. *Pengantar Filsafat Geografi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suryana, N., Mumuh, M., & Hilman, C. 2022. Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan. *Jurnal Inovasi*, *Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran* (*JIEPP*), 2(2), 61-67.
- Susanto, R., & Pangesti, I. 2019. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE* (*Journal of Applied Business and Economic*), 5(4), 340-350.

- Taher, A. 2017. Babak Baru Metode Penelitian Geografi Manusia. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 11(1), 1-22.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K). 2011. *Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K). 2020. Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
- Trisnaningsih, T. 2016. Demografi Edisi 2. Yogyakarta: Media Akademi
- Triwiyanto. T. 2014. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
- Ustama, D. D. 2009. Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1-12.
- Yudiaatmaja, F. 2013. *Analisis Regresi dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Statistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama